PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 50 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenangan kabupaten di bidang pertanahan sebagai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Dinas Pertanahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas pertanahan Kabupaten Bantul
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27...Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bantul;
6. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten bantul;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bantul;
8. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas Pertanahan yang meliputi Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanahan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Pertanahan Merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Pertanahan adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang pertanahan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kebijaksanaan teknis di bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan Pembinaan operasional di bidang Pertanahan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bimbingan teknis di bidang Pertanahan;
- d. Pemberian perijinan di bidang Pertanahan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengendalian dan Pengawasan teknis di bidang Pertanahan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas Pertanahan.

BAB IV ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Laporan;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Pelayanan Informasi;
 - c. Sub Dinas Tata Guna dan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang;
 2. Seksi Bimbingan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang;
 - d. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah;
 2. Seksi Bimbingan Pengaturan Penguasaan Tanah;
 - e. Sub Dinas Hak Atas Tanah, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaturan Hak Atas tanah;
 2. Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah;
 - f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :
 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;